

Descriptive Analysis of Regional Development Indicators by Regency-City in West Nusa Tenggara Province

Musniasih Yuniati^{1*}, Baiq Salkiah², Desi Suryati³, Yorman⁴

Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

Corresponding Author: Musniasih Yuniati musniasih.y@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Indicators, Regional Development

Received : 3 November

Revised : 13 November

Accepted: 21 December

©2023 Yuniati, Salkiah, Suryati, Yorman: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The success of a region's development is measured by several indicators such as HDI, regional inequality, economic growth and poverty levels. The aim of the research is to determine the success of regional development according to city districts in West Nusa Tenggara Province based on regional development indicators. The research method used is a qualitative research method based on quantitative data. The results of the research show that the HDI of districts and cities in West Nusa Tenggara province is in the medium category, namely 50-79. in districts and cities in West Nusa Tenggara Province is fluctuating and tends to increase in 2021

Analisis Deskriptif Indikator Pembangunan Daerah Menurut Kabupaten-Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Musniasih Yuniati^{1*}, Baiq Salkiah², Desi Suryati³, Yorman⁴

Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

Corresponding Author: Musniasih Yuniati musniasih.y@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Indikator, Pembangunan Daerah

Received : 3 November

Revised : 13 November

Accepted: 21 December

©2023 Yuniati, Salkiah, Suryati, Yorman: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Keberhasilan pembangunan suatu daerah diukur oleh beberapa indikator seperti IPM, ketimpangan wilayah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Tujuan penelitian untuk mengetahui keberhasilan pembangunan daerah menurut kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan indikator pembangunan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif berdasarkan data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan IPM kabupaten-kota di provinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam katagori sedang yaitu 50-79 Gini Ratio kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kategori sedang 0,3-0,5 PDRB perkapita menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ketahun jumlah masyarakat miskin di kabupaten-kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat fluktuatif dan cenderung meningkat tahun 2021

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai masyarakat modern melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perubahan yang terencana. Peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Menurut Simon Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas jangka panjang negara yang bersangkutan dalam menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Peningkatan kapasitas dimungkinkan oleh kemajuan atau adaptasi teknologi dan ideologi kelembagaan terhadap kondisi yang ada.

Pembangunan sektor ekonomi juga dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengolah berbagai potensi sumber daya yang dimiliki. Pembangunan ekonomi daerah diartikan sebagai suatu proses yang mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk membuka lapangan kerja baru dan merangsang berkembangnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Untuk merangsang peningkatan kegiatan pembangunan ekonomi wilayah pemerintah harus dapat mencapai indikator-indikator pembangunan seperti indeks pembangunan manusia yang tinggi ketimpangan wilayah yang kecil, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat kemiskinan yang semakin rendah.

Daerah Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi di yang terletak di bagian timur Indonesia yang saat ini sedang melakukan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah di Nusa Tenggara Barat pada tingkat kabupaten kota, Menurut Bapenas (2021) keberhasilan pembangunan daerah dilihat dari variabel pembangunan daerah yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Ketimpangan Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan, Data Indikator Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan IPM tahun 2017 sebesar 66,58 tahun 2018 sebesar 67,37 tahun 2019 sebesar 68,14. Gini ratio th 2018 sebesar 0,372. PDRB Perkapita tahun 2016 sebesar 804,45 ribu jiwa tahun 2017 sebesar 793,78 ribu jiwa tahun 2018 737,46 ribu jiwa. Data Persentase Penduduk Miskin tahun 2016 sebesar 16,48 persen, tahun 2017 sebesar 16,07 persen, tahun 2018 sebesar 14,75 persen (Sumber BPS Provinsi NTB).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi
Menurut Michael Paul Todaro adalah sebuah proses multidimensi yang terkait dengan reorganisasi dan reorientasi seluruh sistem ekonomi dan sosial.
2. Tujuan Pembangunan Ekonomi
 - a. Meningkatkan presentase ketersediaan barang dan jasa
 - b. Meningkatkan pendapatan perkapita
 - c. Mendorong keterbukaan untuk membuat pilihan ekonomi dan sosial secara bertanggung jawab
3. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Bodiono adalah proses peningkatan output per kapita dalam jangka panjang.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
 - a. Sumber daya alam
 - b. Sumber daya manusia
 - c. Modal
 - d. Kemajuan teknologi
5. Pengertian Transformasi struktural
Menurut Szirmai et al (2012) adalah perubahan struktur perekonomian dari sektor tradisional yang produktivitasnya rendah menjadi sektor ekonomi yang produktivitasnya tinggi.
6. Proses Transformasi struktural menurut Todaro
 - a. Proses Akumulasi
 - b. Proses Alokasi
 - c. Proses Distribusi
 - d. Proses Demografi
7. Teori Perubahan Struktur
 - a. Teori Pembangunan Lewis
 - b. Teori pola pembangunan Chenery
8. Pengertian pembangunan ekonomi daerah
Menurut Lincolin Arsyad, merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang berkembangnya kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi di daerah).
9. Pengertian kesejahteraan
Suatu sistem kehidupan sosial, materil, dan spiritual yang memenuhi rasa aman, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara melakukan upaya pemenuhan kebutuhan rohani, jasmani, dan sosial yang terbaik bagi rumah tangga dan masyarakat (Sunarti, 2012).
10. Indikator kesejahteraan masyarakat menurut BPS
 - a. Kependudukan
 - b. Pendidikan
 - c. Ketenaga kerjaan

- d. kemiskinan
11. Pengertian PDRB
PDRB Merupakan nilai total dari seluruh output akhir yang diperoleh pada suatu sistim perekonomian pada tingkat daerah, baik yang dilakukan oleh penduduk daerah tersebut maupun penduduk daerah lain yang mendiami daerah tersebut (Todaro, 2012).
12. Metode perhitungan PDRB
- a. Metode langsung :
 - Pendekatan produksi
 - Pendekatan pendapatan
 - Pendekatan pengeluaran
 - b. Metode tidak langsung:
Pengalokasian nilai tambah kedalam masing masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional sehingga alokator digunakan yang paling besar tergantung produktivitas kegiatan ekonomi menurut harga konstan dan harga berlaku.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam analisis ini data dideskripsikan sebagaimana adanya dan tidak mencari saling hubungan, pengujian hipotesa dan membuat ramalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan sektor ekonomi didaerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dilihat dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu pemerintah daerah harus dapat menciptakan lapangan kerja agar masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang memadai. Pendapatan tersebut kemudian dimanfaatkan dalam membeli barang dan jasa. Produk barang dan jasa dalam suatu daerah dihitung sebagai PDRB. PDRB merupakan bagian dari indikator pembangunan daerah. Menurut Bappenas (2021) variabel indikator pembangunan daerah terdiri dari Indeks Pembangunan Daerah (IPM). Ketimpangan wilayah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan serta daya beli masyarakat. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh kemampuan suatu daerah dalam mencapai indikator yang telah ditetapkan.

Provinsi yang sedang gencar melakukan pembangunan salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembangunan dilakukan dari tingkat kabupaten-kota di Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 8 kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Dompu, Sumbawa, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara sedangkan kota-kota di provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Kota Bima dan Kota Mataram.

Indikator pertama pembangunan daerah adalah indeks pembangunan manusia (IPM). IPM didefinisikan sebagai pengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Menurut Bapenas (2021) ada tiga komponen dalam mengukur indeks pembangunan

manusia seperti Angka Harapan Hidup, angka harapan lama sekolah, dan pengeluaran perkapita. Kriteria IPM menurut United Nation Development Program (UNDP) terdiri dari IPM>80 katagori sangat tinggi, IPM 70-79 katagori tinggi serta IPM 60-79 katagori sedang. Data IPM Kabupaten kota di Provinsi NTB tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. IPM Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2022

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] IPM Kabupaten/Kota		
	2020	2021	2022
Kabupaten Lombok Barat	68,20	68,61	69,41
Kabupaten Lombok Tengah	66,43	66,72	67,57
Kabupaten Lombok Timur	66,30	66,66	67,59
Kabupaten Sumbawa	67,61	68,01	68,89
Kabupaten Dompu	67,84	68,45	69,15
Kabupaten Bima	66,30	66,66	67,57
Kabupaten Sumbawa Barat	71,63	71,85	72,65
Kabupaten Lombok Utara	64,42	64,77	65,70
Kota Mataram	78,91	79,14	79,59
Kota Bima	75,81	76,11	76,84
Nusa Tenggara Barat	68,25	68,65	69,46

Sumber: BPS Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan data pada tabel 1 IPM tertinggi dicapai kota Mataram yaitu 78,91 tahun 2020,79,14 tahun 2021 dan 79,59 tahun 2022 IPM terendah di kabupaten Bima yaitu 66,30 tahun 2020 dan 67,57 tahun 2022. Jika dikaitkan dengan katagori IPM UNDP untuk provinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam kategori sedang yaitu 60,79.

Menurut BPS IPM bahwa masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, pelayanan kesehatan dan pendidikan. IPM berguna untuk mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup masyarakat dan dapat menentukan peringkat pembangunan suatu wilayah dan besaran kinerja pemerintah serta sebagai bagian alokator pengesahan Dana Alokasi Umum. Rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja penduduk, produktivitas yang rendah berpengaruh pada rendahnya tingkat pendapatan dan menyebabkan kemiskinan.

Indikator Pembangunan Daerah yang kedua adalah ketimpangan wilayah. Menurut Karin Voravrer (2007) ketimpangan wilayah adalah ketidakseimbangan struktur spesial didalam wilayah atau antar wilayah. Menurut Sjafrizal (2008), kesenjangan pembangunan daerah diakibatkan oleh perbedaan sumber daya alam, kondisi demografi, kurang efektifnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan perekonomian dan alokasi dana pembangunan antar daerah. Data Gini Ratio Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut kabupaten/kota tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Gini Rasio diKabupaten- Kota Tahun 2015-2021

Kabupaten/Kota	Gini Rasio Provinsi NTB Di Kabupaten-Kota		
	2019	2020	2021
Kabupaten Lombok Timur	0,359	0,364	0,280
Kabupaten Lombok Barat	0,358	0,306	0,389
Kabupaten Lombok Tengah	0,364	0,378	0,338
Kabupaten Lombok Utara	0,355	0,345	0,317
Kabupaten Sumbawa	0,356	0,349	0,412
Kabupaten Sumbawa Barat	0,352	0,299	0,397
Kota Mataram	0,355	0,381	0,429
Kabupaten Bima	0,363	0,358	0,381
Kota Mataram	0,355	0,381	0,429
Kabupaten Dompu	0,357	0,355	0,360
Nusa Tenggara Barat	0,379	0,376	0,381

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Berdasarkan tabel 2 diatas Gini Rasio Kabupaten /Kota tertinggi berada dikota Bima yaitu 0,371 tahun 2019 0,375 tahun 2020 dan 0,413 tahun 2021 Gini Rasio terendah dikabupaten Sumbawa Barat 0,352 tahun 2019 0,299 tahun 2020 dan 0,397 tahun 2021. Nilai Gini Rasio pada dua wilayah yaitu kota Bima dan kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan kecenderungan terjadi peningkatan nilai Gini Rasio dari tahun ketahun. Nilai Gini Rasio Nusa Tenggara Barat bersifat fluktuatif dan cenderung meningkat tahun 2021. Semakin kecil gini rasio atau mendekati nol pemerataan pendapatan dalam suatu negara semakin

sempurna sebaliknya semakin tinggi indeks gini semakin besar ketimpangan yang ditunjukkan.

Menurut Todaro (2003) Distribusi pendapatan negara-negara berkembang dikatakan sangat timpang jika angka Gini antara 0,5-0,7, sedangkan angka Gini antara 0,3-0,5 dan ketimpangan relatif sama jika angka Gini 0,2 -0,3. Angka Gini Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kabupaten kota terletak pada nilai Gini 0,37-0,38. Menurut Todaro dikategorikan dalam dalam ketimpangan sedang karena gini terletak antara 0,3-0,5

Indikator Pembangunan yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan pemerintahan dalam menyediakan barang ekonomi bagi penduduknya. Perhitungan dan pertumbuhan ekonomi dinilai dari PDRB yang merupakan bagian perangkat data ekonomi yang di pakai untuk mengevaluasi kinerja pembangunan sektor ekonomi. Suatu wilayah (provinsi ataupun kabupaten/kota) kenaikan pertumbuhan ekonomi (PDRB) akan meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah untuk membiayai pembangunan daerah. Data PDRB kabupaten kota di Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini

Tabel 3. PDRB Perkapita berdasarkan Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten-kota di Provinsi NTB (Ribu Rupiah) Tahun 2020-2022

Wilayah Kabkota	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribu Rupiah)		
	2020	2021	2022
Kabupaten Lombok Barat	20 254	21 054	22 251
Kabupaten Lombok Tengah	16 156	16 849	18 023
Kabupaten Lombok Timur	15 152	15 666	16 539
Kabupaten Sumbawa	28 442	28 991	30 503
Kabupaten Dompu	29 864	30 810	32 638
Kabupaten Bima	22 241	22 783	24 122

Wilayah Kabkota	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribu Rupiah)		
	2020	2021	2022
Kabupaten Sumbawa Barat	156 835	160 076	207 626
Kabupaten Lombok Utara	18 458	18 753	19 697
Kota Mataram	43 460	45 591	48 770
Kota Bima	26 658	27 529	29 071
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)			

Sumber: Badan Pusat Statistik NTB

Berdasarkan tabel nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku tertinggi dicapai kabupaten Sumbawa Barat dan mengalami peningkatan dari tahun ketahun dalam waktu tahun 2020 sampai tahun 2022. Nilai PDRB terendah berada kabupaten berada pada kabupaten Lombok Timur dengan kecenderungan terjadi peningkatan dalam kurun waktun tahun 2020-2022.

Indikator pembangunan daerah keempat adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Instrumen utama perhitungan indikator kemiskinan adalah garis kemiskinan, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin, kesenjangan kemiskinan. Data jumlah penduduk miskin menurut kabupaten / kota (ribu jiwa) tahun 2019-2021 diprovensi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini

Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa) Tahun 2019-2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa)		
	2019	2020	2021
Kabupaten Lombok Barat	105,04	100,25	105,24
Kabupaten Lombok Timur	193,56	183,84	190,84
Kabupaten Lombok Utara	63,84	59,86	61,70
Kabupaten Lombok Tengah	128,82	128,10	131,94
Kabupaten Bima	71,95	71,32	75,49
Kabupaten Dompu	30,81	30,97	33,26
Kabupaten Sumbawa	63,49	62,88	66,00
Kabupaten Sumbawa Barat	20,45	20,20	21,51
Kota Mataram	43,19	41,80	44,45
Kota Bima	14,80	14,66	16,22
Nusa Tenggara Barat	735,96	713,89	746,66

Sumber : BPS Provinsi NTB

Berdasarkan tabel 4 diatas jumlah penduduk miskin terbanyak berada pada kabupaten Lombok Timur berada pada kabupaten Lombok Timur dengan jumlah yang fluktuatif dan menurun tahun tahun 2021 Jumlah penduduk miskin terendah berada dikota Bima. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat jumlah penduduk miskin berjumlah fluktuatif dan cenderung meningkat tahun 2021.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

IPM kabupaten-kota diprovinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam katagori sedang yaitu 60,79; Gini Rasio provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dikabupaten-kota menurut katagori ketimpangan sedang yaitu 0,3-0,5; PDRB perkapita atas dasar harga berlaku meunjukkan kecenderungan terjadi peningkayab dari tahun-ketahun; Jumlah masyarakat miskin kabupaten-kota diprovinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berfluktuatif dan cenderung meningka pada tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Smith (1997).. Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan, PT Raja Grafindo Pustaka Jakarta
- Arifin. (2003). Keterkaitan Antara Kebijakan fiskal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Suatu Daerah, Jurnal Ekonomi Jakarta
- Arsyad. Lincoln. (1999). Ekonomi Pembangunan, Edisi keempat STIE YKPN Yogyakarta
- Arthur Lewis. (2007). Teori Pertumbuhan Ekonomi, PT Raja Grafindo Pustaka Jakarta
- Becker Garys. (1993). Human Capital, The University Chicago Press
- David Ricardo. (2008). Teori Pertumbuhan Klasik, PT Raja Grafindo Pustaka Jakarta
- Gunadi Brata. Alaysius (2004). Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Daerah Tk II di Indonesia, Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Idris. (2004). Konsep Pembangunan dan Pertumbuhan, Jurnal Makro Ekonomi
- Jhingan. (2000). Tujuan Pokok Pembangunan Ekonomi, Jurnal Makro Ekonomi
- Khuznet Dalam Jhingan. (1994). Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Kenaikan Jangka Panjang, Jurnal Ekonomi Jakarta
- Kuncoro Mudrajat (2015). Indikator Ekonomi, Yogyakarta UPP STIM MKPM
- Santoso Slamet 2011 Statistika Diskriptif Ponorogo Universitas Muhamadiyah Ponorogo
- Supriatna Tjahya. (2000). Strategi Pembangunan dan Kemiskinan Jakarta, Penerbit Rineke Jakarta
- Susanti Hera. (2000). Indikator Indikator Makro Ekonomi Jakarta, LPFE UI
- Sutyastie Prijono. (2002). Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia, Jakarta Penerbit Rineke Cipta
- Todaro Michael P. (1997). Pembangunan Ekonomi di Dunia, Ketiga Jilid 1 Terjemahan Hans Munandar Jakarta, Penerbit Erlangga

Yuniati, M., & Kasman, Y. (2022). Analisis Transformasi Struktural Dan Potensi Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. *KOLONI*, 1(1), 204-212. DOI: <https://doi.org/10.31004/koloni.v1i1.23>